

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Masyarakat dunia yang senantiasa berkembang setiap saat, baik itu dalam hal ekonomi, ilmu pengetahuan, infrastruktur maupun pendidikan, memicu setiap negara untuk meningkatkan sumber dayanya agar bisa lebih bersaing. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan memperbaiki kualitas pendidikan di negaranya masing-masing. Adanya pendidikan yang berkualitas akan menghasilkan sumber daya manusia yang baik pula, sehingga pembangunan di suatu negara dapat berkembang lebih baik lagi. Tidak dapat dipungkiri lagi, pendidikan merupakan salah satu aspek yang memegang peranan penting bagi kehidupan manusia, terlebih pendidikan merupakan salah satu pilar penting bagi peradaban suatu bangsa. Pendidikan dan kemajuan bangsa bagaikan dua sisi mata uang. Keberadaannya saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan (Jerome, 2016).

Berdasarkan ketentuan pada Pembukaan UUD 1945 alinea ke 4, bahwa salah satu tujuan bernegara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam hal ini adalah merupakan sebuah keharusan bagi negara untuk menghadirkan suatu proses pendidikan yang berkualitas sesuai perkembangan zaman. Namun dalam perjalanannya belum seluruhnya pendidikan di daerah dapat disebut berkualitas. Pendidikan nasional menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bertujuan untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Selanjutnya juga bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Tetapi dalam kenyataannya tujuan tersebut belum terealisasi dengan baik, sehingga pendidikan berkualitas belum terwujud sepenuhnya.

Mewujudkan pendidikan yang berkualitas telah banyak dilakukan proses dan pelaksanaannya oleh pemerintah, baik melalui pemenuhan sarana dan prasarana, kesejahteraan guru dan pembangunan infrastruktur lainnya. Berdasarkan sudut manajerial, kepala sekolah merupakan sumber daya manusia yang sangat menentukan karena sebagai manajer, kepala sekolah merupakan pihak yang bertugas sebagai pelaksana untuk mengelola sumber daya manusia, sehingga proses dapat berlangsung dengan baik untuk menghasilkan *output*, sehingga dapat dikatakan bahwa kepala sekolah merupakan salah satu penentu kualitas sekolah (Wagner, 2010). Dalam implementasinya masih ditemukan kelemahan dalam hal tataran pengaturannya atau masih adanya kelemahan dalam manajerial satuan pendidikan. Kelemahan-kelemahan tersebut menyebabkan perjalanan sekolah untuk mewujudkan sekolah berkualitas terganggu. Kepala sekolah masih menggunakan pola-pola lama dalam mengatur pelaksanaan organisasi di satuan pendidikan.

Peningkatan kualitas pendidikan di sekolah dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satu faktor yang paling dominan adalah kepemimpinan kepala sekolah. Kepala sekolah adalah sebagai agen perubahan yang dapat memimpin peningkatan kualitas pembelajaran dengan melibatkan warga sekolah dan masyarakat (Sulaksana, 2020). Dalam kenyataannya masih terdapat kepala sekolah

yang belum melibatkan *stakeholder* yang ada dalam membangun sekolah yang berkualitas. Dalam konteks kepemimpinan di sekolah, etos kerja kepala sekolah yang kuat akan dapat menciptakan sekolah yang berkualitas melalui berbagai macam kegiatan guna menterjemahkan visi dan misi sekolah. Selama ini beberapa kepala sekolah dalam membuat visi dan misi sekolah cenderung tanpa memperhatikan potensi yang dimiliki oleh sekolah tersebut maupun belum mempertimbangkan potensi yang dimiliki oleh guru dan tenaga kependidikannya, sehingga dalam konteks kepemimpinan kepala sekolah di SMK, untuk mewujudkan sekolah berkualitas, persoalan kurikulum merupakan sesuatu hal yang penting.

Kurikulum merupakan jantungnya sekolah yang akan menentukan arah pengembangan sekolah SMK. Kurikulum SMK berbeda dengan kurikulum di SMA. Mengingat pengembangan kurikulum di SMK akan bersentuhan dengan kebutuhan pasar kerja dan keinginan masyarakat terhadap lulusan SMK. Dalam konteks ini kepemimpinan kepala sekolah SMK adalah dalam rangka menjalin kolaborasi yang kuat dengan pasangan DUDIKA (Dunia Usaha, Dunia Industri dan Dunia Kerja), menyelaraskan kurikulum SMK yang dibuat kemendikbud dengan pilihan kompetensi yang ada di lingkungan DUDIKA. Selama ini kepala sekolah di SMK hanya sekedar menerapkan kurikulum yang dikeluarkan oleh kemdikbud saja, belum mau berkolaborasi dengan DUDIKA untuk menyelaraskan kurikulum, padahal keinginan DUDIKA dengan keinginan sekolah kerap terjadi perbedaan. Dalam hal inilah kepemimpinan kepala sekolah di SMK sangat

penting guna menguatkan pengembangan kurikulum SMK demi mewujudkan SMK yang berkualitas.

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP/MTs yang bertujuan salah satunya mempersiapkan siswa untuk masuk lapangan kerja, sehingga dapat menopang ekonomi keluarga dan masyarakat sekitar. Mengingat alumni SMK akan berhadapan langsung dengan dunia kerja dan dunia industri, maka dibutuhkan lulusan SMK yang memiliki keterampilan, sikap yang baik, berbudi pekerti luhur, cinta tanah air serta memiliki daya saing yang tinggi. Lulusan SMK yang memiliki daya saing tinggi tentunya turut serta dipengaruhi oleh pengembangan kurikulum yang selaras dengan kebutuhan DUDIKA. Mutu atau kualitas lulusan SMK tentunya mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap kualitas sekolah tersebut.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Budi Santoso (2020), faktor determinan yang paling berpengaruh terhadap mutu kompetensi lulusan salah satunya adalah kepemimpinan kepala sekolah. Kepala sekolah juga sebagai pelaksana suatu tugas yang sarat dengan harapan dan pembaharuan. Kemas cita-cita mulia pendidikan secara tidak langsung juga diserahkan kepada kepala sekolah. Begitu pula optimisme para orangtua yang terkondisikan pada kepercayaan menyekolahkan anak-anaknya pada sekolah tertentu, tidak lain karena menggantungkan cita-citanya pada kepala sekolah (Fiedler, 2010). Kepala

sekolah harus mampu mendorong percepatan inovasi di segala bidang dengan tetap memperhatikan potensi dan kondisi sebenarnya pada satuan pendidikan, mengingat masing-masing satuan pendidikan memiliki karakteristik yang berbeda dalam berbagai aspek.

Berdasarkan Permendikbud No 6 tahun 2018, beban kerja kepala satuan pendidikan sepenuhnya untuk (1) melaksanakan tugas manajerial, (2) pengembangan kewirausahaan, dan (3) supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan. Beban kerja Kepala Sekolah bertujuan untuk mengembangkan sekolah dan meningkatkan mutu sekolah berdasarkan 8 (delapan) standar nasional pendidikan. Adapun standar kompetensi kepala sekolah berdasarkan Permendiknas No. 13 Tahun 2007 adalah sebagai berikut: Kompetensi Sosial, Kompetensi Kepribadian, Kompetensi Manajerial, Kompetensi Supervisi, Kompetensi Kewirausahaan. Poin penting kepala sekolah pada jenjang SMK adalah kemampuan yang tidak hanya harus menguasai manajerial di dalam sekolah (internal), tetapi juga harus menguasai manajerial di luar (eksternal), dalam hal ini adalah mampu berkomunikasi secara intensif dengan dunia usaha dan dunia industri serta masyarakat dalam rangka mendekatkan sekolah dengan dunia usaha dan dunia industri guna mewujudkan sekolah yang berkualitas.

Pada zaman yang sangat cepat pergerakannya, dimana masyarakat telah mengalami perubahan yang serba dinamis dan sulit diprediksi, seluruh Sumber Daya Manusia (SDM) pendidikan, baik kepala sekolah maupun guru serta tenaga kependidikan dituntut sikap proaktif dalam mengantisipasi perubahan yang terjadi serta melihat kondisi kekinian yang saat ini membutuhkan pemikiran cemerlang

dari seorang kepala sekolah. Seorang kepala sekolah harus mampu menggerakkan seluruh komponen yang ada di sekolah untuk bersama sama berkolaborasi mewujudkan sekolah yang berkualitas, baik secara akademik maupun kualitas secara non akademik. Dalam hal ini kepemimpinan kepala sekolah harus mengikuti kondisi terkini, sesuai perkembangan zaman.

Berdasarkan data pokok dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui website dapodik, di Provinsi Jambi terdapat 183 satuan pendidikan jenjang SMK, baik sekolah negeri maupun swasta. Kemudian dari 183 sekolah tersebut, pada daerah Kabupaten Sarolangun terdapat 24 satuan pendidikan SMK, baik negeri dan swasta. Selanjutnya berdasarkan observasi di SMK Negeri 9 Sarolangun diketahui bahwa sekolah ini merupakan sekolah dengan akreditasi B dan mempunyai keunggulan di bidang ternak unggas dan mereka telah melakukan penyelarasan kurikulum dengan industri ternak unggas di PT Charon Popan Jambi. Observasi juga dilakukan di SMK Negeri 13 Sarolangun, sekolah ini merupakan salah satu sekolah pusat keunggulan pada sektor kesehatan dan satu-satunya sekolah SMK di Kabupaten Sarolangun yang berbasis kesehatan.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis akan melakukan penelitian tentang “Kepemimpinan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan untuk Mewujudkan Sekolah Berkualitas dengan melakukan studi di SMK Negeri 9 dan 13 Sarolangun”.

## 1.2 Masalah dan Fokus Penelitian

Kepala sekolah merupakan orang yang paling pertama bertanggungjawab terhadap kualitas pendidikan di sekolah, maka kepala sekolah harus mampu menjadi manajer yang baik di sekolah. Sebagai pemimpin pendidikan di sekolah, kepala sekolah memiliki tanggung jawab legal untuk menentukan arah kemana organisasi sekolah akan dibawa. Dalam hal sebagai manajer, kepala sekolah harus dapat membuat kebijakan yang tepat untuk mewujudkan sekolah yang berkualitas. Sekolah berkualitas adalah sekolah yang di dalamnya terdapat proses Bergeraknya seluruh warga sekolah.

Kecenderungan yang terjadi di lapangan, satuan pendidikan SMK, kerap melaksanakan kurikulum yang berasal dari kementerian pendidikan tanpa melakukan penyesuaian kurikulum dengan DUDIKA, tidak berkolaborasi dengan DUDIKA melalui pengembangan program SMK, sehingga kebutuhan pasar kerja dengan sekolah tidak terpantau melalui Bursa Kerja Khusus (BKK). Penerapan *link and match* SMK dengan DUDIKA diawali dengan adanya duduk bersama antara pihak sekolah dengan DUDIKA melalui penyesuaian kurikulum sekolah dengan kebutuhan pasar kerja pada DUDIKA.

Sekolah berkualitas pada jenjang SMK tidak saja berkutat pada bidang akademik, maupun tersedianya fasilitas sarana dan prasarana yang lengkap, tetapi juga dibidang non akademik serta kesesuaian program sekolah dengan keinginan DUDIKA yang berwujud dalam penyesuaian kurikulum SMK. Untuk mewujudkan hal tersebut kepemimpinan kepala sekolah hendaknya menerapkan kepemimpinan yang transformatif, mengikuti kondisi kekinian, melakukan terobosan bersama

Dudika, serta berkolaborasi dengan *stakeholder* yang ada di satuan pendidikan.

Berdasarkan masalah tersebut, maka fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kepemimpinan kepala sekolah di SMK Negeri 9 dan 13 Sarolangun?
2. Bagaimana upaya kepala sekolah di SMK Negeri 9 dan 13 Sarolangun dalam mewujudkan sekolah yang berkualitas?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kepemimpinan kepala sekolah di SMK Negeri 9 dan 13 Sarolangun
2. Untuk menganalisis upaya kepala sekolah SMK pada SMK Negeri 9 dan 13 Sarolangun dalam mewujudkan sekolah yang berkualitas.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat secara teoritis berupa :

1. Memperkaya penelitian terdahulu terutama dalam hal kepemimpinan kepala sekolah guna mewujudkan sekolah yang berkualitas.
2. Pengembangan teori untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi kepala sekolah.

Secara praktis penelitian dapat dimanfaatkan sebagai berikut:

1. Bagi Kepala Sekolah dapat menjadi bahan evaluasi guna meningkatkan pengetahuan dan kompetensinya dalam meningkatkan kualitas sekolah pada satuan pendidikan SMK



2. Bagi Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, dapat dijadikan tolok ukur dalam mengembangkan SMK
3. Bagi masyarakat, untuk mengetahui standar pelayanan yang seharusnya mereka peroleh dari keberadaan SMK

### **1.5 Batasan Penelitian**

Berdasarkan masalah dan fokus penelitian di atas, maka penelitian ini akan dibatasi pada hal yang berkenaan dengan kepemimpinan kepala sekolah menengah kejuruan untuk mewujudkan sekolah yang berkualitas di SMK Negeri 9 dan 13 Sarolangun

### **1.6 Definisi Istilah**

1. Kepemimpinan menurut Simerson dan Venn adalah perilaku orang yang mengkomunikasikan arahan atau perintah kepada pengikut atau pekerja.
2. Kepala Sekolah menurut Wahjosumidja adalah seorang tenaga fungsional guru yang diberi tugas untuk memimpin suatu sekolah yang diselenggarakan proses belajar mengajar atau interaksi antara guru dan siswa
3. Sekolah berkualitas menurut Danim adalah sekolah yang di dalamnya terdapat lingkungan yang kondusif, menyenangkan, menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berkpribadian Pancasila.
4. SMK menurut Hanif adalah satuan pendidikan menengah yang mengemban tugas dan fungsi pendidikan. SMK memiliki tugas dan fungsi tersendiri yaitu mempersiapkan peserta didik dengan memiliki seperangkat keahlian dan keterampilan untuk siap bekerja